

## ANALISIS PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI YAYASAN MENTARI SEHAT INDONESIA DALAM PROGRAM ELIMINASI TUBERKULOSIS DI SUKOHARJO

### **Khoirul Hudah**

Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia  
[khoirulhudah@student.uns.ac.id](mailto:khoirulhudah@student.uns.ac.id)

### **Mahendra Wijaya**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia  
[mahendrawijaya@staff.uns.ac.id](mailto:mahendrawijaya@staff.uns.ac.id)

### **Ignatius Agung Satyawan**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia  
[agungsatyawan@staff.uns.ac.id](mailto:agungsatyawan@staff.uns.ac.id)

### **ABSTRAK**

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia. Tingkat kasus TB di Kabupaten Sukoharjo secara presentase sudah melebihi angka nasional. Terdapat tantangan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus yang belum teridentifikasi. Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu melalui metode komunikasi. Yayasan Mentari Sehat Indonesia di Kabupaten Sukoharjo dapat menjadi salah satu media dalam menggalakkan program untuk mengurangi kasus TB khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perencanaan dan kebijakan komunikasi Yayasan Mentari Sehat Indonesia dalam program eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, petugas Yayasan Mentari Sehat Indonesia, dan masyarakat yang menjadi sasaran program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Mentari Sehat Indonesia telah melakukan upaya kolaboratif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam program eliminasi TB, termasuk dalam perencanaan dan kebijakan komunikasi. Komunikasi kebijakan kesehatan yang efektif dapat membantu meningkatkan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan TB di tingkat kabupaten.

**Kata Kunci:** Kebijakan Komunikasi, Komunikasi Kesehatan, Perencanaan Komunikasi, Tuberkulosis, Yayasan

### **Pendahuluan**

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia khususnya Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan laporan *World Health Organization* (WHO), jumlah kasus tuberkulosis yang didiagnosis secara global pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 10,6 juta kasus, mengalami peningkatan sekitar 600.000 kasus dibandingkan tahun 2020 yang sekitar 10 juta kasus TB. Dari total kasus tersebut, sebanyak 6,4 juta orang (60,3%) telah dilaporkan dan menjalani pengobatan, sementara 4,2 juta orang (39,7%) belum

terdeteksi dan belum dilaporkan. Di Indonesia, perkiraan jumlah kasus TB yang ditemukan mencapai 969.000 kasus, mengalami peningkatan sebesar 17% dibandingkan tahun 2020 yang sekitar 824.000 kasus. Dari total perkiraan kasus TB di Indonesia, hanya 443.235 kasus (45,7%) yang terdeteksi, sementara 525.765 kasus (54,3%) lainnya belum ditemukan dan dilaporkan (Global Tuberculosis Report 2022).

Di Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan data yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan setempat hingga tanggal 14 Desember 2022, jumlah penemuan kasus terduga TB sebagai indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan mencapai 7954 orang (70,6%), sedangkan penemuan kasus TB sebanyak 1046 kasus (55,7%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penemuan kasus TB di Kabupaten Sukoharjo melebihi angka nasional (45,7%). Dalam konteks ini, data tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam penemuan dan penanganan kasus TB di Kabupaten Sukoharjo. Meskipun tingkat penemuan kasus TB relatif tinggi dibandingkan dengan angka presentase nasional, masih ada tantangan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus yang belum teridentifikasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan efektif dalam melakukan pemeriksaan dini, diagnosis, serta pelaporan kasus TB guna memastikan penemuan kasus yang lebih akurat dan mengurangi kasus yang belum terdeteksi melalui komunikasi kesehatan.

Komunikasi kesehatan bertujuan untuk mengembangkan atau menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada kelompok audiens tertentu dengan maksud mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan keyakinan mereka tentang pilihan perilaku sehat (Komariah et al., n.d.) sehingga dapat diterapkan dalam program pencegahan kasus TB. Salah satu teori yang relevan yaitu teori perencanaan komunikasi Van Metter dan Van Horn (1975) yang mengemukakan bahwa perencanaan komunikasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang tepat dan efektif merupakan faktor kunci dalam membangun kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat terkait program ini. Namun, kesuksesan program eliminasi tuberkulosis tidak hanya bergantung pada upaya medis, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan yang merupakan salah satu tahap penting dalam kebijakan publik dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian isu-isu publik (H. Situmorang, 2016).

Menurut UNESCO yang dikutip oleh Ugboajah (1980:5) kebijakan komunikasi dirancang untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pelaksanaan komunikasi dalam suatu sistem atau organisasi yang bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Abrar, 2008). Penerapan kebijakan komunikasi yang jelas oleh Yayasan Mentari Sehat Indonesia (MSI) di Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga swadaya masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi dalam program eliminasi tuberkulosis. Kebijakan ini juga akan memastikan bahwa pesan dan strategi komunikasi yang disampaikan secara konsisten, akurat, dan sesuai dengan tujuan organisasi dalam upaya mencapai eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Sukoharjo. Dalam konteks ini, Yayasan Mentari Sehat Indonesia memainkan peran penting dalam kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk program eliminasi TB di wilayah Kabupaten Sukoharjo sehingga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, perlu melakukan analisis perencanaan kebijakan komunikasi yang terkait dengan implementasi program eliminasi tuberkulosis.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kebijakan komunikasi yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan pelaksanaan program eliminasi tuberkulosis oleh Yayasan Mentari Sehat Indonesia di Kabupaten Sukoharjo.

### **Teori dan Metodologi**

#### **Perpektif Perencanaan Komunikasi Van Metter dan Van Horn**

Teori perencanaan komunikasi van Metter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa perencanaan komunikasi adalah suatu proses yang sistematis dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengarahkan komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan komunikasi melibatkan tahapan yang terstruktur, seperti identifikasi tujuan komunikasi, penentuan audiens sasaran, pengembangan pesan yang tepat, pemilihan saluran komunikasi yang efektif, serta evaluasi dan pengendalian hasil komunikasi. Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa perencanaan komunikasi merupakan fondasi penting dalam pengembangan kebijakan komunikasi yang sukses. Dalam bukunya yang berjudul "*Planning and Organizing for Social Change*" (1975), mereka menyatakan, "*The purpose of communication planning is to assist an organization in creating and maintaining an*

*effective communication system that enables the organization to achieve its objectives"* (Littlejohn & Foss, 2011).

Teori perencanaan komunikasi Van Metter dan Van Horn juga memberikan penekanan pada pentingnya pemahaman konteks dan audiens dalam merancang strategi komunikasi termasuk faktor-faktor seperti budaya, nilai-nilai, serta kebutuhan dan karakteristik audiens. Dalam bukunya, van Metter dan Van Horn menyatakan, *"The communicator must consider all possible relevant aspects of the audience's social system—values, knowledge, and behavior—when designing a communication plan."* Dengan memadukan teori perencanaan komunikasi Van Metter dan Van Horn dengan teori Sistem Komunikasi dan teori Agenda Setting, kita dapat memperoleh landasan yang kuat dalam merencanakan kebijakan komunikasi yang efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Perencanaan komunikasi sangat relevan dalam konteks komunikasi kesehatan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu kesehatan, perencanaan komunikasi yang efektif menjadi kunci utama. Perencanaan Komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai, dan bagaimana cara mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut (Cangara 2014).

### **Perspektif Pelaksanaan Kebijakan: Komunikasi Kesehatan**

Teori pelaksanaan kebijakan memfokuskan pada tahap implementasi kebijakan publik dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelesaian isu-isu publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan antara lain adalah peran aktor, kebijakan yang kompleks, sumber daya yang tersedia, serta dukungan politik (Mazmanian & Sabatier, 2014). Teori jaringan kebijakan (*policy network theory*) memberikan kontribusi penting dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan memadukan teori pelaksanaan kebijakan dan teori jaringan kebijakan, dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan komunikasi. Hal ini

dapat membantu dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pelaksanaan yang efektif dan mempertimbangkan dinamika yang terlibat.

Salah satu teori yang relevan dalam komunikasi kesehatan adalah teori *Health Belief Model* (HBM) bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap keparahan penyakit, kerentanan individu terhadap penyakit, manfaat yang dirasakan dari mengadopsi perilaku sehat, serta hambatan-hambatan yang ada dalam mengubah perilaku. Dalam bukunya yang berjudul "*Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*" (2015), Glanz, Rimer, dan Viswanath menjelaskan, "*The Health Belief Model focuses on individual beliefs about health conditions, the perceived benefits of action, and the barriers to action*". Komunikasi kesehatan bertujuan untuk mempengaruhi, menginformasikan setiap individu, masyarakat, maupun yang lainnya bahwa kesehatan sangat penting untuk kebutuhan manusia. Pemerintah daerah menjalankan komunikasi kesehatan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) (Umra et al., 2022). Sesuai dengan kerangka perencanaan komunikasi dan komunikasi kesehatan diatas, dalam perencanaan komunikasi kesehatan, pendekatan berbasis partisipatif muncul sebagai metode yang relevan.

### **Metodologi**

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2014), dan metode studi kasus (Yin, 2014). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program, termasuk petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, petugas Yayasan Mentari Sehat Indonesia, dan masyarakat yang menjadi sasaran program. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami persepsi dan pengalaman mereka terkait perencanaan dan kebijakan komunikasi dalam program eliminasi tuberkulosis (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder seperti dokumen kebijakan, laporan program, dan materi komunikasi yang digunakan dalam program (Bowen, 2009). Observasi non-partisipan mencakup cara penyampaian pesan, interaksi antara petugas dan masyarakat, serta respons masyarakat terhadap program (Kawulich, 2005).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Profi Yayasan Mentari Sehat Indonesia Sukoharjo**

Yayasan Mentari Sehat Indonesia (MSI) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kesehatan di Indonesia yang fokus utama pada program-program eliminasi tuberkulosis (TB) di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Sukoharjo. Dalam konteks program eliminasi TB di Kabupaten Sukoharjo, yayasan ini berperan aktif dalam kolaborasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Mereka menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang TB, termasuk tanda dan gejala, metode pencegahan, dan pentingnya diagnosis dini. Selain itu, yayasan ini juga terlibat dalam upaya penyediaan fasilitas pemeriksaan dan pengobatan TB yang mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini, Yayasan Mentari Sehat Indonesia menjadi mitra penting bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam upaya mencapai eliminasi TB di Kabupaten Sukoharjo.

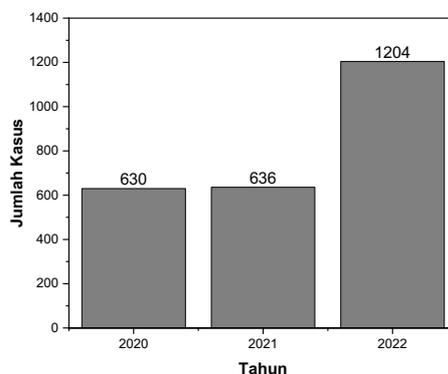
### **Perencanaan Komunikasi Kesehatan Program Eliminasi Tuberkulosis**

Dalam praktiknya, perencanaan komunikasi Yayasan Mentari Sehat Indonesia (MSI) dalam program eliminasi TB di Kabupaten Sukoharjo mencakup beberapa tahapan. Pertama, identifikasi tujuan komunikasi dilakukan dengan mengarahkan upaya mencapai tujuan *zero* TB di kabupaten Sukoharjo pada tahun 2026. Hal ini merujuk pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 96 Tahun 2020 pada Bab II tentang Isu Strategis pasal 4 antara lain: (a) penemuan kasus TB yang masih rendah; (b) belum dilaksanakan pencegahan dan pengobatan TB secara optimal; (c) masih banyak pasien TB tidak diketahui status HIV – nya; (d) masih rendah keberhasilan pengobatan TB; (e) belum banyak penelitian dan/atau riset mengenai TB; dan (f) hasil pemantauan mutu eksternal laboratorium belum baik. Lalu peran MSI sendiri terlibat dalam program eliminasi TB merujuk pada Bab V pasal 2 huruf F yaitu melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta jejaring kemitraan untuk kegiatan Penanggulangan TB dengan institusi terkait di tingkat kabupaten.

Kedua, penentuan audiens sasaran dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan lini kesehatan, petugas kesehatan yang terlibat dalam program TB, dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Audiens ini menjadi fokus utama dalam komunikasi yang dilakukan, baik untuk memastikan penyampaian informasi yang tepat kepada petugas kesehatan maupun edukasi kepada masyarakat terkait TB. Ketiga, pengembangan pesan yang tepat dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik TB sebagai penyakit menular yang dapat mengenai paru-paru dan organ

lain dalam tubuh. Pesan-pesan kesehatan yang dikembangkan mencakup informasi mengenai penyebaran TB, gejala awal, pentingnya diagnosis dini, dan upaya pengobatan yang efektif. Pesan-pesan ini dirancang dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Keempat, pemilihan saluran komunikasi yang efektif dilakukan dengan mempertimbangkan media luar ruang seperti baliho atau spanduk yang dipasang di fasilitas layanan kesehatan, penyebaran flayer atau pamflet secara luas di masyarakat, dan pemanfaatan media sosial serta media massa. Pemilihan saluran komunikasi ini bertujuan untuk mencapai jangkauan yang luas dan menjangkau audiens sasaran secara efektif. Terakhir, evaluasi dan pengendalian hasil komunikasi dilakukan dengan memantau capaian kasus TB di wilayah Sukoharjo. Jika terdapat peningkatan drastis dalam jumlah kasus yang terdeteksi, hal ini menjadi indikasi bahwa komunikasi yang dilakukan telah memberikan hasil positif. Evaluasi dilakukan melalui sistem data Dinas Kesehatan yang bernama Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), sehingga dapat terukur sejauh mana program komunikasi berhasil mencapai tujuan eliminasi TB.



**Gambar 1.** Data Pencapaian Kasus TB 2020-2022

Dengan merujuk pada teori perencanaan komunikasi van Metter dan Van Horn, serta teori komunikasi kesehatan dan *Health Belief Model* (HBM), Yayasan Mentari Sehat Indonesia telah merancang perencanaan dan kebijakan komunikasi yang sistematis dan terstruktur dalam program eliminasi TB di Kabupaten Sukoharjo. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi serta mencapai tujuan *zero* TB di wilayah tersebut. Analisis perencanaan komunikasi Yayasan Mentari Sehat Indonesia dalam program eliminasi Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Sukoharjo mengungkapkan beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan mencakup kurangnya

penekanan pada pendekatan partisipatif, kurangnya pendekatan komunikasi berbasis bukti, evaluasi komunikasi yang belum menyeluruh, penggunaan teknologi komunikasi yang belum optimal, dan ketidakadanya pemantauan serta pembaruan kebijakan komunikasi.

Pendekatan partisipatif merupakan aspek penting dalam perencanaan dan kebijakan komunikasi yang dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam program eliminasi TB (Arnstein, 1969). Teori komunikasi berbasis bukti (*evidence-based communication*) menekankan penggunaan bukti-bukti empiris dalam merancang dan menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat (Viswanath & Kreuter, 2008). Teori evaluasi komunikasi menyatakan bahwa evaluasi yang komprehensif dapat memberikan wawasan tentang efektivitas strategi komunikasi dan membantu perbaikan berkelanjutan (DeVito, 2013) dan teori kebijakan publik menyatakan bahwa pemantauan dan pembaruan kebijakan merupakan bagian integral dari proses kebijakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tantangan yang ada (Howlett & Ramesh, 2003).

### **Komunikasi Kesehatan : Eleminasi TB Kabupaten Sukoharjo**

Teori pelaksanaan kebijakan menjadi kerangka teoritis yang digunakan, yang menekankan pentingnya implementasi kebijakan secara efektif dan efisien serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**Tabel 1.** Struktur Organisasi MSI Kabupaten Sukoharjo

No	Nama Divis	Peran dan Tanggung Jawab
1	Staf Program	Merancang dan mengimplementasikan program-program komunikasi terkait elimiasi TB Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program eliminasi TB
2	Staf Admin dan Keuangan	Perencanaan dan pengelolaan keuangan dan administrasi yang terkait dengan kegiatan MSI Sukoharjo Melakukan kegiatan advokasi untuk memperoleh dukungan keuangan dan sumber daya lainnya
3	Manajer Kasus DPPM	Melakukan pengawalan kebijakan secara eksternal dengan mitra kesehatan terkait eliminasi TB Membantu dalam pendampingan dan pelacakan kasus TB serta pencegahan pasien berhenti pengobatan
4	Koordinator DPPM	Mendukung peran dan tugas Manajer Kasus DPPM dalam implementasi kebijakan eliminasi TB

---

5	Koordinator Kecamatan	Membantu staf program dalam pelaksanaan tugas di setiap Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo
		Bertanggung jawab dalam mencari data kasus TB di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

---

Implementasi kebijakan komunikasi didukung oleh sumber daya yang mencakup anggaran, tenaga kerja, teknologi komunikasi, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan komunikasi. Dalam konteks ini, terdapat dua sumber daya yang menjadi fokus, yaitu anggaran dan teknologi komunikasi. Pertama, anggaran untuk implementasi kebijakan komunikasi diperoleh melalui program Global Fund yang memiliki jejaring internasional dengan STPI-Pena Bulu dan bermitra dengan Mentari Sehat Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori keuangan publik oleh Mikesell (2019). Dukungan anggaran yang diberikan melalui program Global Fund memungkinkan pelaksanaan program komunikasi yang efektif, termasuk pengembangan materi komunikasi, pelatihan tenaga kerja, dan kegiatan promosi kesehatan. Kedua, teknologi komunikasi berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan komunikasi. Penggunaan platform digital seperti website resmi STPI-Pena Bulu, website Mentari Sehat Indonesia, dan sistem data SITK (Sistem Informasi Tuberkulosis Kota/Kabupaten) merupakan contoh penerapan teknologi komunikasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan komunikasi.

Dalam kerja sama antara MSI Sukoharjo dengan Dinas Kesehatan Sukoharjo, penjangkaran kasus TB dilakukan melalui peran Kader Relawan TB MSI yang aktif mencari kasus-kasus TB di desa-desa yang merekomendasikan jika menemukan kasus TB untuk segera dilakukan diagnosis di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Jika kasus terkonfirmasi positif TB, pasien akan diberikan pengobatan sampai sembuh. Konteks ini teori kolaborasi menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antaraktor yang terlibat dalam upaya penyelesaian masalah publik. Menurut Chris Ansell dan Alison Gash dalam bukunya "*Collaborative Governance in Theory and Practice*" (2007), "*Collaboration is the process through which actors, including individuals and organizations, jointly produce a negotiated understanding and implement a common strategy to address a shared problem*" (Ansell & Gash, 2007). Kolaborasi antara MSI Sukoharjo, Dinas Kesehatan Sukoharjo, dan aktor-aktor lain merupakan implementasi dari teori kolaborasi dalam upaya eliminasi TB.

Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan kebijakan komunikasi terkait TB oleh yayasan MSI di Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh dinamika politik, dukungan politik seperti Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 96 Tahun 2020 dan berperan dalam advokasi kemitraan dengan DPRD Komisi IV untuk mendapatkan dukungan politik dan anggaran yang diperlukan untuk program eliminasi TB. Dalam hal budaya, MSI telah melakukan pendekatan komunikasi yang beragam. Mereka menyampaikan pesan-pesan penting terkait TB melalui saluran komunikasi seperti website resmi MSI, website resmi STPI-Pena Bulu, dan sistem data SITK yang terkait dengan data kasus TB sebagai database. Pesan-pesan yang disampaikan berfokus pada edukasi masyarakat mengenai gejala awal TB, bahaya penyakit jika tidak diobati, serta ancaman penularan kepada keluarga dan orang lain. MSI juga melakukan pendampingan langsung kepada pasien yang putus berobat (*Lost to Follow Up/LTFU*) untuk mengadvokasi agar mereka kembali melakukan pengobatan hingga sembuh. Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang putus berobat tidak disebabkan oleh pelayanan kesehatan yang kurang maksimal di fasilitas layanan kesehatan. Beberapa faktor yang memengaruhi adalah persepsi bahwa penyakit TB telah sembuh ketika tidak ada gejala yang berlebihan pada tubuh, serta preferensi terhadap pengobatan herbal daripada pengobatan di puskesmas atau rumah sakit.

Pendekatan komunikasi MSI berupaya mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai keparahan dan kerentanan terhadap TB, serta memberikan informasi mengenai manfaat pengobatan dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2015). Salah satu kelemahan yang ditemukan adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya eliminasi TB. Faktor budaya seperti persepsi bahwa penyakit TB telah sembuh ketika tidak ada gejala yang berlebihan atau preferensi terhadap pengobatan herbal dapat menjadi hambatan dalam merubah perilaku masyarakat. Kelemahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia. Meskipun anggaran diperoleh melalui program Global Fund dan penggunaan teknologi komunikasi telah diterapkan melalui platform digital, masih terdapat keterbatasan dalam hal tenaga kerja, infrastruktur, dan sumber daya lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan komunikasi, terutama dalam hal mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo dan mencapai target audiens yang luas. Teori pelaksanaan kebijakan, terdapat beberapa konsep yang dapat

menggambarkan kelemahan-kelemahan tersebut. Salah satunya adalah konsep "*implementation gap*" yang mengacu pada kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan implementasinya (George, 1980). Kelemahan dalam partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya dapat memperkuat adanya kesenjangan implementasi yang dapat menghambat kesuksesan kebijakan dan menunjukkan bahwa upaya yang lebih intensif untuk melibatkan masyarakat perlu dilakukan, seperti melibatkan mereka dalam perencanaan program komunikasi dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan terkait eliminasi TB.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan dalam implementasi kebijakan. Misalnya, peningkatan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang TB melalui pendekatan komunikasi yang lebih beragam dan relevan dengan budaya setempat. Selain itu, perlu adanya peningkatan sumber daya, baik dalam hal tenaga kerja maupun infrastruktur, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan komunikasi secara efektif. Dalam teori perencanaan dan implementasi kebijakan, terdapat konsep "*policy feedback*" yang dapat menjelaskan pentingnya evaluasi dan pembelajaran dari implementasi kebijakan sebelumnya (Pierson, 2004). Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, MSI dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan komunikasi.

## **Kesimpulan**

Yayasan Mentari Sehat Indonesia (MSI) telah melakukan perencanaan dan implementasi kebijakan komunikasi yang sistematis dalam program eliminasi Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Sukoharjo yang terbukti efektif dalam penjarangan kasus TB, diagnosis, dan pengobatan pasien. Pendekatan komunikasi yang beragam, termasuk penggunaan platform digital dan pendekatan partisipatif, telah dilakukan untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terkait TB. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya partisipasi aktif masyarakat, keterbatasan sumber daya, evaluasi komunikasi yang belum menyeluruh, penggunaan teknologi komunikasi yang belum optimal, dan ketidakadanya pemantauan serta pembaruan kebijakan komunikasi. Untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan tersebut, langkah-langkah perbaikan perlu dilakukan, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan sumber daya, evaluasi yang komprehensif, pemanfaatan teknologi komunikasi yang lebih efektif, dan pemantauan serta pembaruan kebijakan secara teratur.

## Referensi

- Abrar, Ana Nadya, 2008, *Kebijakan Komunikasi : Konsep, Hakekat dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. doi:10.1093/jopart/mum032.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. *Health Education & Behavior*, 31(2), 143-164.
- Baran, S. J., & Davis, D. K. (2017). *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Cengage Learning.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Cangara, H, 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F., Mayer, R., & Johnston, K. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- DeVito, J. A. (2013). *Human Communication: The Basic Course*. Pearson.
- DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The Qualitative Research Interview. *Medical Education*, 40(4), 314-321.
- Eldberg, M. (2015). *Health Promotion and Health Behavior: Theory, Research, and Practice* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- George, E. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2015). *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice* (4th ed.). Jossey-Bass.
- H. Situmorang, C. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)* (Cetakan Pertama, Vol. 1). Social Security Development Institute (SSDI).
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Kawulich, B. B. (2005). Participant Observation as a Data Collection Method. *Forum: Qualitative Social Research*, 6(2), Art. 43.
- Komariah, K., Perbawasari, S., Nugraha, R., & Ryanto Budiana, H. (n.d.). *Pola Komunikasi Kesehatan dalam Pelayanan dan Pemberian Informasi Mengenai Penyakit TB Pada Puskesmas di Kabupaten Bogor*.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of human communication*. Waveland Press.

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (2014). *Policy Implementation: Barriers and Opportunities*. In *Theories of the Policy Process* (3rd ed.). Westview Press.
- Mikesell, J. L. (2019). *Fiscal Administration: Analysis and Applications for the Public Sector*. Cengage Learning.
- Pierson, P. (2004). *Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis*. Princeton University Press.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2014). *Theories of the Policy Process* (3rd ed.). Westview Press.
- Umra, M., Suriady, I., & Alfiyaty, R. (2022). *Perencanaan Komunikasi Dinas Kesehatan dalam Menyukseskan Program Vaksin Covid-19 di Kota Palu* (Vol. 9, Issue 1).
- Viswanath, K., & Kreuter, M. W. (2008). Health Disparities, Communication Inequities, and eHealth. *American Journal of Preventive Medicine*, 34(5), S131–S133.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.